

**REFLEKSI KE-INDONESIAAN: KAJIAN SISTEM PEMERINTAHAN
KERAJAAN BALANIPA ABAD XVI-XVII**
*(INDONESIAN REFLECTION: STUDY OF THE GOVERNMENT SYSTEM OF
BALANIPA KINGDOM IN THE 16TH AND 17TH CENTURIES)*

Abd.Karim

Universitas Indonesia

Email: karimhistory92@gmail.com

ABSTRACT

The kingdom of Balanipa (Mandar) was "democratic" before Indonesia was born. If one reflection of Indonesia is a democratic government system, then the political identity that we rely on as a Democratic State existed before this country was born. That the soul of Indonesianness existed before the presence of Europeans in the Archipelago. In fact, it was been practiced in the Kingdom of Balanipa (Mandar) in the 16th-17th centuries as a local form of government (mara'dia). This system featured a Kingdom constitution serving to limit the King from wielding absolute power. The traditional institution held the power to dismiss the king as a leader, such as the President who can be removed from his position by the country's People's Consultative Assembly (MPR). The leader is chosen by the will of the people. A reflection of the system of government, that the soul of the age which is now a legacy of the nation's past itself is not a western nation's inheritance as a colonial nation. Furthermore, this article will answer the big question, namely, how are democratic practices applied in Mandar? How was democracy interpreted by the elite and the Mandar community? and how was the system of government run in Mandar in the sixteenth and seventeenth centuries? This article employ historical research methods, using local sources (Lontara'), complemented by sources from the colonial era. The practice of democracy, namely the birth of the concept of Mengga Lenggoq Mengga Belawa, is one of the concepts offered by the system of government. The soul of Democracy is embedded in the following concepts: (1) Manu' Tandi Pessisi'i (a chicken whose scales are not seen), meaning that in daily life, regardless of status or position, customary law is still upheld; (2) Beang Tandi Gati (rice that does not need to be measured), meaning a People-based economy, while also attaching importance to the interests of the lower class; (3) Beluwa' Tandi Biti (combed hair that no longer needs to be held in place), meaning continuous unity; and (4) Ara Ratang Tandi Dappai (rope that does not need to be measured), meaning that the law or judicial system does not discriminate.

Keywords: Government, Mara'dia, democracy, Indonesia, Mandar, Balanipa

ABSTRAK

Kerajaan Balanipa (Mandar) telah "berdemokrasi" sebelum Indonesia lahir. Apabila salah satu cerminan Indonesia adalah sistem pemerintahan demokratis, maka identitas politik yang kita sandang sebagai Negara Demokratis telah ada sebelum negara ini lahir. Bahwa jiwa keindonesiaan telah ada sebelum kehadiran Bangsa Eropa di Nusantara. Bahkan telah dipraktekkan di Kerajaan Balanipa (Mandar) pada abad XVI-XVII sebagai sistem pemerintahan lokal (*mara'dia*). Sistem tersebut memiliki perangkat konstitusi kerajaan di mana kedudukan raja tidak mutlak berkuasa. Lembaga *hadat* memiliki kuasa untuk memberhentikan raja sebagai pemimpin, seperti presiden yang bisa diturunkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) negara ini. Pemimpin dipilih atas kehendak rakyat. Sebuah refleksi sistem pemerintahan, bahwa jiwa zaman yang sekarang merupakan warisan dari masa lalu bangsa ini sendiri bukan warisan bangsa barat sebagai bangsa penjajah. Selanjutnya Artikel ini akan menjawab pertanyaan besar yakni, bagaimana praktek-praktek demokrasi diterapkan di Mandar? Bagaimana demokrasi itu diterjemahkan oleh elit dan masyarakat Mandar?, dan bagaimana sistem pemerintahan itu dijalankan di

Mandar pada abad XVI-XVII? artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah. Dengan menggunakan sumber lokal (*Lontara*) dan dilengkapi dengan sumber-sumber dari zaman kolonial.

Kata Kunci: pemerintahan, mara'dia, demokrasi, Indonesia, Mandar, Balanipa

PENDAHULUAN

Melihat Indonesia dengan kaca mata “barat” merupakan sebuah kekeliruan. Oleh Harry J. Benda menegaskan itu dalam tulisannya yang berjudul *Democracy in Indonesia*, merupakan Review buku Tulisan Herbert Feith yang berjudul *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Di mana Benda mengangkat sebuah argumen bahwa kesalahan terbesar kami adalah melihat Indonesia dengan kacamata barat (Benda, 1964: 450). Lebih jauh lagi Benda menyebut bahwa tulisan tersebut “cacat”. Bernada tajam namun Benda berangkat dari argumen, kita tidak boleh menggeneralisir pandangan barat kepada budaya yang lain. Artinya, perspektif yang kita pahami sebelumnya tidak boleh “dipaksakan” dalam membaca kondisi yang berbeda dengan kita (Sutherland, 1995). Benda pun ragu terhadap budaya barat yang beragam untuk membaca budaya lain. Dengan kata lain bahwa apa yang menjadi produk barat tidak serta-merta dapat diadopsi oleh semua bangsa lain, karena bisa saja apa yang dialami oleh sebuah bangsa dalam perjalanan zamannya merupakan sebuah warisan yang tidak dijangkau oleh sudut pandang lain.

Sartono Kartodirdjo juga mengungkap perkembangan historiografi sejarah Indonesia Di mana usaha penulisan sejarah disebarkan dengan berbagai cakrawala salah satunya adalah cakrawala *religio-magis* serta *kosmologi* (Kartodirdjo, 2014: 2). Dalam pandangan ini, penulisan sejarah kritis telah menyediakan alat-alat metodologis yang secara ilmiah akan mengungkapkan fakta-fakta dari sumber-sumber sejarah lanjut Sartono. Artinya untuk menangkap peristiwa masa lalu yang tidak terekam oleh bangsa barat (arsip Bangsa Eropa) dapat kita lakukan dengan

menggunakan sumber-sumber lokal dengan menggunakan alat-alat metodologis yang secara ilmiah akan mengungkap peristiwa tersebut. Dengan kata lain, Sejarah Indonesia tidak lagi dibaca dari sudut pandang Bangsa Barat tetapi dari sudut pandang kita sendiri.

Salah satu cara membaca Sejarah Indonesia yakni melalui mitos, mengingat dalam sumber-sumber lokal banyak berkisah tentang mitos. Roland Barthes dalam tulisannya yang berjudul *Mythologies* mengajukan sebuah gagasan bahwa mitos merupakan sebuah sistem komunikasi, bahwa dia adalah sebuah pesan (Barthes, 1983: 151). Artinya, sebuah mitos dapat menggiring kita kepada sebuah peristiwa di masa lalu di mana peran mitos sebagai tanda dari satu gejala dalam peristiwa tertentu. Salah satu contohnya yakni tentang asal-usul masyarakat Sulawesi secara umum. *Tomanurung* merupakan sebuah konsep yang ditawarkan dalam *Lontara'* untuk membaca leluhur masyarakat Sulawesi. Terkhusus pada Masyarakat Mandar, dalam *Lontara'* dijelaskan bahwa leluhur orang Mandar dikenal dengan *tonipanurung di langiq* (manusia yang diturunkan dari langit) dan bermukim di daerah pegunungan dan memperistri *tokombong di Bura* (manusia yang muncul di atas busa air) (Yasil, 1985: 204). Tidak dinafikan bahwa asal usul orang Mandar dikisahkan dengan unsur mitologi namun mitos tersebut bisa saja membawa kita pada sebuah argumen bahwa Orang Mandar adalah masyarakat yang bercorak agraris dan maritim. Diperkuat pula dengan bukti bahwa salah satu leluhur Orang Mandar bernama *Torije'ne* bertemu dengan *Pongkapadang* di pesisir laut karena perahu *Torije'ne* rusak (Leyds, 2006). Sebuah sistem kepercayaan yang

tertuang dalam *Lontara'* sebagai sumber tradisional Masyarakat Mandar.

Membaca Mandar melalui sumber lokalnya menjadi *fair*, bukan berarti sepenuhnya mempercayai mitos yang digambarkan dalam *Lontara'*, namun apa yang kemudian tergambar dalam *Lontara'* merupakan representasi dari gejala masyarakat di Masa lalu. Bahwa orang Mandar merupakan representasi dari masyarakat agraris dan maritim. Pada konteks yang demikian, kita tidak menafikan apa yang kemudian ditulis oleh bangsa Eropa (Belanda) tentang Mandar. karena beberapa sumber-sumber Belanda juga mengacu pada *Lontara'*. Salah satunya adalah *Memorie Van Overgave* yang ditulis W.J. Leyds, tulisan tersebut berbicara Mandar dan menggunakan sudut pandang Mandar dengan mengacu pada *Lontara'*.

Oleh karenanya dalam studi ini, penulis akan banyak menggunakan sumber-sumber *Lontara'* dalam mengidentifikasi nilai-nilai demokrasi masyarakat Mandar yang telah tertanam jauh sebelum negara ini lahir. Bahwa jiwa ke-Indonesiaan yang kita rasakan sekarang merupakan warisan dari leluhur kita bukan warisan dari Bangsa Eropa. Pernyataan Benda dalam *Democracy in Indonesia*, Apa yang terjadi kepada Indonesia? jawabannya adalah karena Belanda. Benda tidak membenarkan bahwa apa yang terjadi di Indonesia adalah semua karena Belanda, namun justru ia ingin mengungkap bahwa apa yang menjadi pemahaman kita terhadap Indonesia sebagai negara jajahan tidak sepenuhnya mewarisi apa yang dibawa oleh Bangsa Barat. Salah satunya adalah jiwa demokrasi.

Meski demokrasi merupakan produk dari barat dan dalam studi ini tetap menggunakan istilah tersebut bukan berarti demokrasi yang saya ungkap dalam masyarakat Mandar adalah warisan dari Barat. Seperti kita ketahui bersama bahwa demokrasi produk barat berasal dari Athena yang membentuk *polis* (negara kota) dan menyebut *polis* mereka sebagai demokrasi (Ball, 2013: 18). Selanjutnya demokrasi terus berkembang dan melahirkan tokoh-

tokoh demokrasi mulai dari generasi klasik Solon (638-558SM), Chleisthences (C.508 SM) Pericles (490-429 SM) Demosthenes (385-322) sampai ke generasi selanjutnya Plato, Aristotle, John Milton, John Locke dan masih banyak lagi filsuf-filosuf yang mendukung dan mengkritik demokrasi sebagai dasar konstitusional sebuah negara. Tidak dapat dinafikan bahwa perkembangan gagasan demokrasi sangat pesat terutama di Eropa pada abad pertengahan beriringan dengan perkembangan kapitalisme. Selanjutnya perkembangan tersebut merembes ke Timur beriringan dengan ekspansi bangsa barat ke Timur termasuk ke Asia Tenggara. Argumen tersebut tentu saja dengan menggunakan Perspektif bangsa barat bahwa apa yang terjadi di Asia Tenggara bahkan di Indonesia merupakan hasil dari Pengaruh Bangsa Eropa.

Perspektif di atas tentu saja akan bertentang dengan perspektif Indonesia sendiri. Bahwa, dalam penerapan dan asas-asas demokrasi telah ada sebelum bangsa barat menginjakkan kakinya bahkan membentangkan layar pertama mereka menuju Asia Tenggara ataupun Indonesia. Oleh karena itu, studi ini akan menjawab sebuah keresahan penulis bahwa apa yang menjadi masa lalu kita bukanlah produk barat, melainkan sebuah produk yang diproduksi dari masyarakat kita sendiri. Dengan kata lain demokrasi kita adalah hasil pemikiran kita sendiri.

Pada kasus Mandar Darmawan Mas'ud Rahman dengan karya disertasinya yang berjudul *Puang dan Daeng Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa Mandar* (Rahman, 1988) yang diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul *Puang dan Daeng: Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa Mandar* telah mengkaji Sistem Nilai Budaya Orang Mandar terutama pada kajian kepemimpinan (Rahman, 2015). Darmawan memaparkan struktur-struktur dalam pemerintahan Kerajaan Balanipa Mandar dengan menawarkan konsep Puang dan Daeng yang lahir dari nilai Budaya Kerajaan Balanipa Mandar. Selanjutnya

Mattulada dalam tulisannya yang berjudul *Demokrasi dalam Tradisi Masyarakat Indonesia* (Mattulada, 1986). Mengungkapkan bahwa konsep Demokrasi yang kita anut juga bukan sebuah warisan dari barat. Bahwa asas kerakyatan, musyawarah, mufakat, gotong-royong dsb telah kita terapkan jauh sebelum pengaruh bangsa Eropa (Mattulada, 1986: 14).

Berpedoman pada dua tulisan di atas, studi ini akan mengkaji nilai-nilai Demokrasi dalam masyarakat Mandar melalui sistem pemerintahan Kerajaan Balanipa yang Darmawan Mas'ud dan Mattulada belum kaji secara mendalam. Selanjutnya studi ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana praktek-praktek demokrasi diterapkan di Mandar? Bagaimana demokrasi itu di terjemahkan oleh elit dan masyarakat Mandar? dan bagaimana sistem pemerintahan itu dijalankan di Mandar pada abad XVI-XVII?

METODE

Studi ini menggunakan metode penulisan sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pengumpulan sumber (Heuristik) dilakukan oleh penulis di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penulis menemukan beberapa sumber berupa laporan Belanda terkait dengan Kerajaan Balanipa. Penulis juga menemukan catatan-catatan Belanda di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Selain itu, Penulis juga menelusuri sumber-sumber berupa Lontara' di Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Sumber tersebut merupakan sumber lokal Mandar yang memberikan kondisi Kerajaan Balanipa pada abad XVI-XVII.

Proses selanjutnya yakni kritik, penulis memberikan kritik terhadap sumber yang telah ditemukan. Proses ini penting untuk menyeleksi dan menarik benang merah dari sumber-sumber yang kontradiktif. Kontradiktifnya sumber tersebut disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda saat penulisan sebuah dokumen. Sumber yang ditulis oleh VOC ataupun

Pemerintah Hindia Belanda akan sangat berbeda dengan sumber sejarah yang ditulis oleh masyarakat lokal dalam bentuk tulisan lontara'.

Selanjutnya yakni interpretasi, proses ini sangat penting untuk menarik sebuah fakta yang ditemukan setelah melalui proses kritik. Pada tahap ini penulis menjawab seluruh permasalahan yang telah diajukan terutama menyangkut pemerintahan di Mandar. Membaca proses demokrasi yang telah ada di Mandar adalah tujuan utama dari proses ini. Lebih dalam lagi, penulis mengungkapkan nilai demokrasi yang telah ada di Mandar pada Abad XVI-XVII. Selanjutnya proses historiografi merupakan proses terakhir, di mana sejarah dituliskan dalam tulisan ilmiah. Sudut pandang Indonesiasentris merupakan tuntutan utama proses ini. tujuannya adalah untuk menghasilkan tulisan sejarah yang memandarkan Sejarah Mandar.

PEMBAHASAN

Orang Mandar

Orang Mandar dikisahkan dalam *Lontara''* berasal dari *Tomanurung*. *Pongkapadang* merupakan keturunan *tomanurung di langi'*. Dikisahkan bahwa *Pongkapadang* yang berasal dari *Ulu Sa'dang* yang merupakan daerah pegunungan dan menetap di aliran Sungai Sa'dang. Ia melakukan perjalanan menyusuri aliran Sungai dan sampai di Bulu Mappa, ia melihat asap yang membumbung tinggi dan menghampiri sumber asap tersebut, ia mengira seseorang berada di tempat itu. setelah sampai pada sumber asap tersebut, ia pun bertemu dengan Torije'ne dan kakaknya yang sedang menempuh perjalanan jauh, namun berlabuh di daerah itu karena perahunya rusak akibat terjangan ombak. Singkat cerita Pongkapadang dan Torije'ne menikah melahirkan 7 anak. Dan keturunan-keturunan Pongkapadang inilah yang menjadi raja-raja di Mandar (Leyds, 1940: 11).

Berdasarkan pemaparan diatas, Pongkapadang sebagai bapak dari keturunan raja-raja di Mandar berasal dari wilayah yang dikenal dengan nama Toraja sekarang, di mana Sungai Sa'dang terletak di daerah Toraja, indikasi bahwa keturunan orang Mandar adalah Orang Toraja itu kuat, namun dalam kisah tersebut, dikatakan *Pongkapadang* hidup di aliran Sungai bukan berarti hidup di Sungai Sa'dang, bisa saja hidup di wilayah lain di mana air dari sungai tersebut mengalir. Argumen bahwa keturunan orang Mandar dari orang Toraja pun bisa diruntuhkan dengan melihat jarak antara Toraja dan Mandar di mana jaraknya yang sangat jauh meski wilayah tersebut terhubung.

Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa *Pongkapadang* bertemu dengan *Torije'ne* di suatu tempat di mana perahu *Torije'ne* rusak. Adanya perahu, jelas bermakna bahwa tempat pertemuan itu adalah di daerah pantai, dengan penegasan bahwa perahunya rusak akibat ombak yang besar. Berdasarkan mitos tersebut bahwa orang Mandar ataupun keturunan-keturunan dari raja-raja berasal dari dua tempat yang berbeda yakni *Pongkapadang* dari pegunungan dan *Torije'ne* dari Lautan. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa mitos menggambarkan sebuah peristiwa namun perlu penafsiran dalam, sehingga dapat diterima oleh logika. Kisah yang dipaparkan dapat bermakna bahwa keturunan para raja-raja di Mandar berasal dari "air" dalam artian hidupnya tidak terlepas dari air, entah itu air yang bersumber dari pegunungan (sungai) ataupun dari lautan. Kisah tersebut juga menggambarkan bahwa masyarakat Mandar adalah masyarakat bercorak agraris dan maritim.

Meski interpretasi ini sifatnya masih subyektif, namun sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa Masyarakat Mandar adalah suku bangsa yang besar meski dalam penulisan sejarah di Sulawesi Selatan, Mandar sering kali disebut sebagai bagian dari Bugis ataupun Makassar. Kerajaan Balanipa (Mandar) Menguasai wilayah

yang luas, apabila direfleksikan dengan zaman sekarang, wilayah kerajaan ini meliputi seluruh wilayah Sulawesi Barat bahkan sebagian Sulawesi Tengah. Dengan Persekutuannya yang terkenal dengan nama *Pitu Ba'bana Binangan* (Tujuh Kerajaan Pesisir) dan *Pitu Ulunna Salu* (Tujuh Kerajaan Gunung). Dalam perkembangannya, Di Mandar ada dua periode kepemimpinan yakni kepemimpinan *Tomakaka* dan *Mara'dia*. Setiap periode kepemimpinan, memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai demokrasi yang tertanam dalam sistem pemerintahan orang Mandar, maka menjadi penting studi ini melakukan perbandingan antara dua periode kepemimpinan tersebut.

Periode Kepemimpinan *Tomakaka*

Tomakaka terbagi atas dua suku kata *tau* dan *kaka*. *Tau* berarti orang dan *kaka* berarti kakak apabila kedua kata ini digabung maka akan mengandung arti kakak atau orang terdahulu. Dalam konotasi bahasa Mandar apabila kata *kaka* mendapat awalan "ma" menjadi *Makaka* dan akhirnya menjadi *Tomakaka* (orang yang dituakan atau orang yang diangkat menjadi pemimpin). (Syah, 1998: 58). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Tomanurunglah* yang mewariskan keturunan raja-raja di Mandar, termasuk *Tomakaka* juga merupakan keturunan dari *Tomanurung*. Dalam seminar kebudayaan yang dilakukan di Majene tercapai sebuah kesepakatan dan berdasar pada Lontara' Muhamma' bahwa *Tomakaka* pertama yang muncul dalam bertempat tinggal di Ulu' Saddang. *Tomakaka* pertama bernama Pullaomesa. (Anonim, 1984: 109; Syah, 1998: 58-59) Ditegaskan pula dalam Leyds bahwa Pullaomesa adalah *Tomakaka* yang pertama (Leyds, 1940).

Tomakaka Pullaomesa diberi gelar *Tomakaka Ulu Sa'dang* karena memerintah di *Ulu Sa'dang*. Meski data ini bersumber dari Lontara' di mana "aroma" mitos dalam Lontara' sangat kental, namun memberikan data sejarah yang menarik. Dalam

historiografi sejarah Mandar, wilayah pesisir selalu diagung-agungkan dan mengesampingkan wilayah pegunungan, seakan melupakan bahwa kerajaan pertama yang ada di Mandar bermula dari pegunungan bahkan “bapak” dari orang-orang Mandar bersal dari pegunungan. Menyebut itu hanya sebuah mitos atau sesuatu yang tidak masuk akal adalah pandangan yang keliru karena apabila dirunut kejadiannya, Orang Mandar dimulai dari daerah Pegunungan Ulu Sa’dang.

Ulu Sa’dang (kepala Sa’dang), di mana Sa’dang itu sendiri adalah nama dari sungai. *Ulu* yang berarti kepala itu merepresentasikan hulu makan *Ulu Sa’dang* itu bermakana Hulu Sungai Sa’dang. inilah yang ditolak baru-baru ini oleh pemakalah yang tidak perlu disebutkan namanya dalam Konferensi Nasional Sejarah X di Jakarta, mengatakan bahwa itu tidak dapat dipercaya. Meski dengan argumen yang kuat namun Lontara’ sebagai sumber sejarah lokal Sulawesi Barat tidak boleh dikesampingkan. Terlepas dari argumen di atas, perkembangan kepemimpinan *Tomakaka* di Mandar semakin berpengaruh ditandai dengan digunakannya gelar ini di seluruh wilayah Mandar sebagai gelar seorang raja. Cara penyebarannya pun dilakukan dengan cara ekspansi dan politik kawin-mawin

Dalam Lontara’ dikisahkan pernikahan antara anak-anak raja, di mana kisah anak dari Banua (kerajaan) Rantebulawan menikah dengan anak Raja Bone (Syah, 1991: 25-27). Dalam Lontara’ tersebut dikisahkan pula beberapa anak raja yang menikah dengan anak raja dari kerajaan lain. Hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai strategi politik. Jelas bahwa menikahkan keturunan antar kerajaan adalah salah satu cara yang digunakan untuk mempererat hubungan darah. Berdasarkan analisis di atas, ada dua sintesa yang dapat ditarik di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, politik kawin mawin yang dilakukan oleh beberapa banua (kerajaan) mengindikasikan persaingan antara kerajaan di Mandar saat itu sangat keras. Mau

tidak mau untuk menjadi yang terkuat dari beberapa kerajaan lain adalah dengan melakukan kerja sama, semakin banyak “kawan” maka lawan akan semakin takut. Bagaikan semboyan yang kita kenal “bersatu kita teguh bercerai kita runtuh”. Konsep pemersatu ini sebenarnya telah ada sejak dulu, kerajaan-kerajaan di Mandar, bahwa dengan bekerja sama maka kerajaan lain dapat ditaklukkan.

Kedua, adalah politik kawin mawin yang dilakukan oleh Kerajaan Rantebulawan dengan Kerajaan Bone, kisah ini cukup menarik. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa anak dari Kerajaan Rantebulawan (perempuan) mandi di sungai, hanyutlah rambutnya yang panjangnya 7 depa. Sampai ke wilayah Kerajaan Bone, rambut tersebut ditemukan oleh anak Raja Bone. Dan anak raja tersebut berniat untuk mencari pemilik rambut itu dan pada akhirnya menemukan pemilik rambut dan menikahinya. Menikahi I Lando Beluak dengan izin raja tentunya (Syah, 1991: 25-27). Yang menarik adalah pada poin rambut tersebut sampai ke Kerajaan Bone dan dengan mudahnya anak dari Kerajaan Bone menikahi anak Raja Rantebulawang.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana rambut tersebut bisa sampai ke Kerajaan Bone? di mana jarak antara Mandar dan Bone sangat jauh. Dan mengapa dengan mudahnya anak dari Raja Bone dengan mudah menikahi putri raja? nampaknya Kerajaan Bone saat itu merupakan kerajaan besar, ditunjukkan dengan mudahnya pangeran dari Bone menikahi putri raja, tanpa diadakan sebuah pertarungan ataupun pengajuan syarat-syarat tertentu. Kekuasaan Bone boleh jadi satu modal utama yang bisa digunakan oleh Kerajaan Rantebulawan untuk mengamankan dirinya dalam arena persaingan antar kerajaan saat itu. tentu cerita ini tidak masuk akal apabila dihadapkan dengan perspektif kekinian. Pada tahap inilah pembacaan sistem dalam mitos itu diperlukan. Bahwa dalam mitos tersebut menggambarkan kerja sama politik antar dua kerajaan untuk

mempertahankan eksistensinya dalam persaingan antar kerajaan.

Politik kawin mawin yang dikisahkan merupakan representasi dari kondisi daerah pada saat itu, jelas peperangan sering terjadi, perebutan wilayah sering terjadi, dengan strategi kawin mawin kemudian memudahkan dan membuka jalur politik. Namun, satu hal yang cukup menarik adalah kisah tentang keturunan raja-raja yang saling bersaudara dalam artian lahir dengan luluhur yang sama. *Pongkapadang* yang telah disebutkan di atas sebagai leluhur dari raja-raja di Mandar. Namun, seiring berjalannya waktu kerajaan-kerajaan yang dikatakan satu darah ini, saling bermusuhan satu sama lain. Justru ini memberikan informasi bahwa dari masa *Pongkapadang* sampai pada masa peperangan antar kerajaan memiliki jarak waktu yang sangat jauh sehingga tali persaudaraan yang dulu ada menjadi luntur akibat perkembangan zaman. Dan pada akhirnya dibangun kembali dengan politik kawin mawin tersebut.

Tentu, dengan kondisi politik yang digambarkan menunjukkan bahwa perkembangan kerajaan-kerajaan di Mandar secara politik sangat pesat, hingga melahirkan satu kerajaan yang mempunyai pengaruh besar yakni Kerajaan *Passokkorang*. Kerajaan yang berhasil berkuasa dan membawa pengaruh yang cukup besar terutama pada masa pemerintahan Raja Lareang Tepatnya Pada abad XV (Leyds, 1940: 22-23). Namun dalam sumber-sumber sejarah bahkan literatur sejarah Mandar, Kerajaan *Passokkorang* dianggap sebagai kerajaan yang kejam, menindas kerajaan-kerajaan disekitarnya, termasuk kerajaan Napo di mana Kerajaan ini yang menjemput I Manyambungi (todilaling) di Gowa untuk meminta bantuan mengatasi Kerajaan *Passokkorang* yang menindas kerajaan tersebut (Syah, 1991: 35-37).

Kisah dijemputnya I Manyambungi merupakan awal dari terbentuknya kerajaan Balanipa dan dimulainya periode kepemimpinan *Mara'dia* di Mandar. Terlepas dari kisah-kisah tersebut, angka

tahun pada periode kepemimpinan *Tomakaka* memang tidak sejelas dengan periode kepemimpinan *Mara'dia*, sumber-sumber terkait masih belum banyak menjelaskan tentang angka tahun itu. namun, untuk masa keemasan pemerintahan *Tomakaka*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya berada pada periode Kerajaan *Passokkorang* Raja Lareang perkiraan abad XV diperoleh dari tahun di mana Balanipa sebagai kerajaan yang meletakkan pemerintahan *Mara'dia* pertama ada pada awal abad XVI. Dengan tolak ukur kelahiran anak I Manyambungi yang diperkirakan lahir pada tahun ± 1550 (Leyds, 1940: 26).

Periode kepemimpinan ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah pemerintahan di Mandar. Karena Periode ini merupakan awal kelahiran demokrasi di Mandar. Presistensi yang terjadi ketika Kerajaan *Passokkorang* berkuasa di Mandar memicu segala aktivitas politik yang terjadi pada periode tersebut. Masyarakat yang pada mulanya sangat tunduk kepada *Tomakaka* dengan corak pemerintahan Totalitariannya akhirnya melakukan perlawanan. Kehadiran I Manyambungi sebagai seorang tokoh merepresentasikan perlawanan tersebut. Dan setelah I Manyambungi berhasil menaklukkan Kerajaan *Passokkorang* dan meredam dominasi Kerajaan Tersebut, Kerajaan Balanipa pun lahir dengan gagasan konsep kepemimpinan *Mara'dia*.

Periode Kepemimpinan *Mara'dia*

Benih demokrasi pun tumbuh, apabila demokrasi itu sebuah pohon, maka pemerintahan *mara'dia* adalah akarnya. I Manyambungi sebagai *Mara'dia* Pertama di Mandar sekaligus sebagai Raja Pertama Kerajaan Balanipa. Gelar *mara'dia* juga lahir ketika kerajaan ini terbentuk. Kerajaan yang dalam perkembangannya menjadi kerajaan terbesar yang pernah ada di Mandar. Periode kepemimpinan *Mara'dia* berawal ketika I Manyambungi dijemput di Kerajaan Gowa oleh Orang-orang Napo yang merasa tertindas oleh Kerajaan

Passokkorang (Syah, 1991: 10 dan 37). Kisah yang dituangkan dalam *Lontara*'' ini menunjukkan bahwa masa kekuasaan Passokkorang mencapai puncaknya namun tercapainya puncak dari kekuasaan ini berdampak pada kesemena-menaan terhadap kerajaan lain. Selanjutnya I Manyambungi sebagai agensi yang mengubah struktur dalam hal ini Pemerintahan, di mana sistem pemerintahan *tomakaka* menjadi struktur yang berhasil diubah.

Power yang dimiliki oleh agen di atas cukup kuat karena mampu mengganti struktur yang ada, bukan hanya mengubah dan mengganti sistem itu namun membangun sebuah kerajaan yang pengaruhnya sangat besar bagi tatanan kehidupan politik di Mandar. Hadirnya I Manyambungi pada akhirnya mengalahkan Kerajaan Passokkorang dengan menggunakan sebuah tombak yang bernama *I Naga*, membawa gong kebesaran Kerajaan Gowa dan sebuah bedil (Syah, 1991: 10). Menarik, yang kemudian menjadi perhatian besar adalah Kerajaan Gowa yang sering disebut-sebut dalam *Lontara*'' Mandar bahkan sangat diagungkan, dan apabila dilihat dari kisahnya, Gowa mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan politik pemerintahan di Mandar saat itu. jelas, I Manyambungi menjadi agen dan mempunyai power yang kuat tak lepas dari pengaruh Kerajaan Gowa. Ini bermakna bahwa Kerajaan Gowa memiliki kuasa dalam meligitimasi Mandar. Terlihat dari hanya satu orang yang dibimbing oleh Kerajaan Gowa dalam hal ini I Manyambungi. Hanya satu orang yang mewakili Kerajaan Gowa, meski I Manyambungi sendiri berdarah Orang Mandar. Ia bisa mengalahkan dominasi Passokkorang bahkan membentuk hegemoni baru dalam tatanan masyarakat Mandar saat itu. Kisah itu juga menunjukkan bahwa Pertalian antara Kerajaan Gowa dan Mandar memang tidak pernah putus dalam *Lontara*'' terutama dengan Kerajaan Balanipa.

Terlepas dari hubungan Balanipa dan Gowa, lahirnya Kerajaan Balanipa merupakan awal dari lahirnya sistem pemerintahan *Mara'dia*. Raja-raja di Mandar tidak lagi bergelar *Tomakaka* namun berganti menjadi *Mara'dia*. Di mana *Mara'dia* pertama adalah I Manyambungi. Ia Tidak hanya berperan sebagai agensi dalam kisah ini namun juga sebagai "hero". Sidney Hook dengan konsep heronya, yakni sebagai orang yang lahir di tengah-tengah kekacauan dan menyelesaikan masalah yang terjadi (Hook, 1969: 12).

Berdasarkan kisah sebelumnya bahwa I Manyambungi hadir di tengah kekacauan yang terjadi di Mandar. Menjadi Hero bagi orang-orang Napo dan menjadi agensi dalam perubahan struktur pemerintahan Tomakaka di Mandar bahkan membentuk kerajaan baru dengan sistem yang baru pula. Dengan kerajaan baru dan sistem yang baru ini menjadikan Kerajaan Balanipa sebagai Kerajaan terbesar di Mandar saat itu.

Membaca Nilai-Nilai Demokrasi di Mandar

Terbentuknya Kerajaan Balanipa memberikan dampak yang sangat signifikan di wilayah Mandar. salah satu langkah pembaharuan yang dilakukan oleh I Manyambungi Sebagai Raja Pertama membentuk Sistem pemerintahan. Sebagai seorang raja ia membentuk *banua kaeang*. terdiri dari dua kata yakni *banua* berarti rumah dan *kaeang* berarti besar jadi apabila kedua kata ini berada dalam satu frase maka akan memiliki arti rumah besar. Rumah besar yang dimaksudkan disini bukanlah rumah secara harfiah namun merupakan suatu wilayah di mana wilayah ini merupakan wilayah Kerajaan Balanipa yang memiliki pengaruh dan legitimasi kuat. Wilayah-wilayah yang dimaksud yakni, *banua kaeang* Napo, *banua kaeang* Samasundu, *banua kaeang* Mosso dan *banua kaeang* Todang-todang. Keempat *Banua* tersebut dikenal dengan istilah sebagai *Appe' Banua Kaiyyang* (empat wilayah besar) (Mandra, 1991: 108).

Ke-Empat *Banua* inilah yang kemudian menjadi penentu dari segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Balanipa (Raja Balanipa) salah satunya adalah pengangkatan seorang raja (*Mara'dia*). *Appe' Banua Kaiyyang* jugalah yang melantik semua perangkat pemerintahan mulai dari *Mara'dia Matoa* (perdana menteri), *Mara'dia Malolo* (panglima perang), dua orang *Pa'bicara* (penasehat) dan 8 *Pappuangan*. Adapun dua orang *pa'bicara* dan 8 *papuangan* dikenal sebagai "*Ada Sappulo Sokko*" (Anonim, 1984: 191). Apabila ditinjau secara struktural, sistem pemerintahan di atas merupakan sebuah sistem pemerintahan yang merepresentasikan sebuah Negara. *Banua* sebagai Lembaga tertinggi kerajaan dikenal juga dengan sebutan Lembaga *Hadat*. Apabila di refleksikan dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia maka posisi *Hadat* sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sebagaimana tugas dari MPR sebagai lembaga negara mempunyai tugas untuk melantik bahkan menurunkan seorang pemimpin. *Hadat* sebagai lembaga kerajaan juga memiliki wewenang yang sama dengan MPR bahkan segala kebijakan yang berhubungan dengan kerajaan, harus melalui persetujuan dari lembaga ini. Begitu pula ketika seorang raja ingin diangkat dan diturunkan dari jabatannya. Seorang *mara'dia* sebagai seorang raja harus memiliki kecakapan sebagai seorang pemimpin dengan kata lain bahwa seorang raja yang diangkat harus memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya yakni:

1. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian, ketegasan dan kebijaksanaan.
2. Memiliki/ ilmu keahlian untuk memimpin dan memiliki ilmu agama islam yang cukup (tamam) mengaji.
3. Memiliki tanda jasa yang terbukti dalam hidupnya (bukti kebaikan dan usaha yang bermanfaat untuk masyarakat yang terfakta lewat pengalaman dalam hidupnya.

4. Terbaik diantara sekian diantara sekian orang pilihan yang di calonkan (yang paling baik).
5. Idealisme rakyat (amanah penderitaan rakyat) yang sepanjang saat tidak kunjung bisa terobati harus jadi konsepsi utama untuk membanahinya.
6. Memperjuangkan kepentingan rakyat kecil dan demi memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, segala daya upaya hendaknya secara maksimal dikerahkan, meski jiwa akan jadi taruhannya (Mandra, 2008: 13-14).

Syarat-syarat di atas harus dimiliki oleh seorang calon *Mara'dia* dan di antara beberapa syarat yang disebutkan di atas, secara keseluruhan menyangkut budi pekerti luhur, tidak ada yang menyinggung masalah fisik, pangkat dan kedudukan semua orang berhak untuk menjadi *Mara'dia* setelah dipilih oleh lembaga *hadat* sebelumnya. Jadi siapa pun yang memenuhi syarat tersebut dan terpilih oleh dewan *hadat*, maka dia berhak untuk menjadi *Mara'dia* (raja) di Kerajaan Balanipa. Selanjutnya melalui proses pemilihan oleh dewan-dewan yang mewakili rakyat. pada tahap ini, pemilihan raja tidak dipilih langsung oleh rakyat seperti konsep demokrasi yang bersama kita pahami namun dalam syarat-syarat di atas, menunjukkan bahwa seorang raja haruslah tetap melindungi kesejahteraan rakyatnya dan siapa saja boleh mencalonkan/menjadi raja apabila memenuhi syarat-syarat tersebut.

Dalam *Lontara'* dikenal dengan *O Diadaq O Dibiasa* (sesuai ketentuan adat dan kebiasaan). Pedoman tersebut tertuang dalam pesan I Manyambungi yang berbunyi:

Madondong duang bongi anna mateaq, da mupajari mara'dia, mau anaqu mua'tania, tonamaq asayangngi Litaq muaq masuangi pulu-pulunna, matoqdori kedona, apaq yamo tuqu ditingo, namarrupuq-ruppuq banua.

Artinya: besok lusa bila saya meninggal, jangan engkau mengangkat seorang raja kendatipun anakku atau cucuku, kalau

bukan orang yang akan menyayangi negeri kalau tutur katanya tidak senonoh, kalau tingkah lakunya kaku dan kasar sebab orang seperti itulah yang akan menghancurkan negeri (Yasil, 2012: 25-26)

Pesan ini kemudian menguatkan bahwa seorang pemimpin di Kerajaan Balanipa bisa siapa saja yang memenuhi kriteria yang telah dijabarkan sebelumnya. Artinya setiap warga masyarakat berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Jiwa demokrasi juga nampak dalam sistem pemerintahan Kerajaan Balanipa dengan melihat kondisi Kerajaan. Kondisi tersebut sebagai berikut:

1. Hasil laut tidak ada lagi atau jarang
2. Hasil pangan tidak ada lagi atau jarang
3. Tidak ada lagi orang yang berani berbicara tentang kebenaran, karena dilarang bicara oleh penguasa walaupun berbicara tentang kebenaran
4. Buah-buahan tidak jadi atau jarang ditemukan.
5. Gunung-gunung tandus dan tidak membuahkan hasil
6. Terjadi kemarau panjang
7. Rakyat terancam kelaparan (Mandra, 1990: 116; Yasil, 2012: 17-18).

Poin ke tiga merupakan jiwa demokrasi berupa penekanan terhadap posisi seorang pemimpin dan bagaimana pemerintahan itu dijalankan dengan kata lain bahwa seorang penguasa tidak lagi memiliki kuasa untuk bersikap otoriter terhadap rakyatnya. Apabila seorang raja memberikan batasan kepada rakyatnya untuk menyuarakan kebenaran maka raja tersebut patut untuk diturunkan dari jabatannya. Secara keseluruhan, gambaran kondisi kerajaan di atas merepresentasikan kondisi rakyat yang tidak sejahtera dan pemerintahan yang bersifat otoriter. Seperti yang di ungkap oleh Aristoteles bahwa setiap warga negara harus mempunyai kesamaan (Diane, 2005: 13).

Sebuah kisah dalam *Lontar Patodioloang* seorang *mara'dia* yakni Daeng Riosok ingin memperistri permaisuri Raja Kerajaan Pamboang. Ia memaksa

dengan menyerang kerajaan tersebut namun pasukan yang ikut serta dengan Daeng Rioso hanya pengawal Pribadinya, orang Balanipa tidak ikut serta (Syah, 1992: 11). Sikap tegas dari rakyat Balanipa tidak ingin mendukung Raja yang ingin merebut istri seseorang. Di mana tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji. Rakyat tidak mendapat tekanan dari *mara'dia* bahkan ia hanya berangkat bersama pengawal pribadinya. Dan pada akhirnya *mara'dia* Daeng Rioso diturunkan dari jabatannya oleh *Hadat* Balanipa atas persetujuan rakyat Kerajaan Balanipa karena telah melakukan tindakan yang tidak terpuji (Syah, 1992: 10-13).

Selain syarat-syarat untuk mengangkat ataupun menurunkan jabatan seorang raja, jiwa Demokrasi yang terpenting dalam sistem pemerintahan Kerajaan Balanipa yakni adanya Lembaga *Hadat*. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa *Appe' Banua Kaiyyang* merupakan representasi Lembaga *Hadat* yang mempunyai legitimasi tertentu namun Perlu diketahui bahwa *Banua* yang dimaksud disini adalah wilayah yang dulunya merupakan wilayah yang memakai sistem pemerintahan *Tomakaka*. Pembentukan lembaga baru yang dilakukan oleh Tomepayung (Raja Ke-2 Kerajaan Balanipa), agaknya merupakan usaha untuk menghilangkan "aroma" *Tomakaka* di Mandar ataupun merupakan usaha untuk merangkul keempat wilayah ini menjadi dalam satu kesatuan politik dalam wadah Kerajaan Balanipa. Dengan kata lain memberikan jabatan sebagai badan lembaga yang berhak mengangkat *Mara'dia* (raja) *Tomakaka* tidak serta merta hilang setelah munculnya *Mara'dia*, namun direproduksi menjadi bentuk yang baru tanpa melepaskan statusnya sebagai bangsawan.

Tidak hanya sampai disitu, Tomepayung menjadi pelopor dari terbentuknya persekutuan antar kerajaan-kerajaan besar di Mandar, *Pitu Ba'bana Binanga*. Persekutuan ini sangat berdampak pada kerjasama antar anggotanya yakni Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang,

Mamuju, Tappalang dan Binuang. Pada masa ini, gelar Mara'dia tidak hanya menjadi sebuah gelar yang disematkan pada Kerajaan Balanipa namun seluruh kerajaan-kerajaan termasuk 7 kerajaan besar ini wajib menggunakan gelar ini, menggantikan gelar sebelumnya yakni Tomakaka. Nampak bahwa dominasi kuasa dari Kerajaan Balanipa pada masa ini sangat kuat, Semua kerajaan harus tunduk pada pemerintahan Balanipa. terlebih lagi dalam konfederasi tersebut yang menjadi "bapak" (pemimpin) adalah Balanipa.

Balanipa sebagai pemimpin (wakil) dari seluruh kerajaan-kerajaan di Mandar tidak hanya dibuktikan dengan sumber-sumber berupa *Lontara*" namun sumber-Sumber Belanda kolek Arsip Nasional senada dengan hal tersebut. Nampak pada salah satu dokumen penandatanganan kontrak antara Balanipa (wakil Mandar) dengan pihak Belanda pada tanggal 30 Mei 1850 (Arsip Nasional, 1850). Berdasarkan pembacaan arsip yang dilakukan, perjanjian ini adalah kontrak pertama yang dilakukan oleh Kerajaan Balanipa sebagai wakil Mandar dengan pihak pemerintah kolonial Belanda. Beberapa isi dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa kerajaan Balanipa adalah bagian dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Kalimat ini bisa saja mengindikasikan bahwa Belanda telah menguasai Mandar, karena Balanipa telah merupakan bagian dari pemerintah kolonial Belanda.

Namun berdasarkan sumber-sumber Pemerintah Kolonial Belanda memang sering kali menggunakan kalimat ini dalam kontrak-kontraknya tetapi tidak bermakna bahwa Belanda telah merebut kekuasaan pada daerah itu. Pada tahun tersebut memang Belanda sudah mulai memperluas wilayah perdagangannya sehingga yang dipermasalahkan dalam kontrak ini adalah seringkali kapal dagang Belanda dibajak oleh perompak disekitar wilayah Kerajaan Balanipa (Mandar) oleh karena itu Balanipa sebagai wakil Mandar diberikan hadiah sebagai imbalan atas pengamanan kapal-

kapal dagang Belanda (Arsip Nasional, 1850).

Terlepas dari kedatangan pemerintah Kolonial Belanda di Mandar, secara struktural dalam hal ini pemerintahan Belanda tidak membawa dampak yang signifikan kecuali pada abad XIX setelah penandatanganan kontrak antara Kerajaan Balanipa dan Pemerintah Kolonial Belanda. Meskipun seiring berjalannya waktu, sistem pemerintahan Kerajaan Balanipa (Mandar) diganti oleh sistem pemerintahan Kolonial. Dengan kata lain bahwa pemerintah Koloniallah yang "meredupkan" jiwa demokrasi yang ada di Mandar.

Jiwa Demokrasi yang dimaksud dalam sistem pemerintahan Kerajaan Balanipa yakni musyawarah untuk mencapai mufakat. Bahwa poin ini menjadi sangat penting dalam berdemokrasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Asas terpenting dari Demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa seorang pemimpin tidak mempunyai legitimasi untuk memberikan larangan kepada rakyat yang ingin berkata kebenaran. Selain itu, dalam pengambilan keputusan di Kerajaan Balanipa, selalu menggunakan musyawarah sebagai cara untuk mengambil keputusan terutama keputusan yang menyangkut kepentingan Federasi Kerajaan Mandar yang terkenal dengan nama *Pitu Ba'bana Binanga*.

Pitu Ba'bana Binanga: Simbol Demokrasi Mandar

Apabila Edward Poelinggongang menyebut periode Kemandaran sebagai periode bangkitnya mandar dengan terbentuknya Kerajaan Balanipa, maka pada periode terbentuknya Konfederasi *Pitu Ba'bana Binanga* disebut sebagai Periode *Amara'diang* (Darmawan Mas'ud). Konfederasi Tujuh Kerajaan Pesisir (*pitu ba'bana binanga*) merupakan nama federasi ini. Dibentuk oleh Tomepayung (raja ke-2 Kerajaan Balanipa). Konfederasi ini dibentuk setelah serangan yang dilakukan oleh Tomepayung atas Kerajaan Passokkorang, dikisahkan dalam *Lontara'*

bahwa orang-orang berkumpul di Tammajarra, maka Raja Balanipa mengirim utusannya menuju Sendana, Banggae dan Pamboang. Berkatalah Raja Sendana: duluanlah kembali hai utusan. Akan saya ajak karib kerabatku yakni Raja Mamuju dan Raja Tappalang begitupun dengan Raja Pamboang yang kemudian diajak oleh Raja Sendana, Mamuju dan Tappalang (Yasil, 1985: 209). Dan pada akhirnya berkumpul enam kerajaan yang merupakan cikal bakal dari persekutuan Kerajaan-Kerajaan Pesisir.

Enam Kerajaan ini kemudian melakukan musyawarah untuk membentuk sebuah persekutuan dan berjanji akan saling melindungi serta bekerja sama satu sama lain di berbagai bidang demi kepentingan bersama (muktamar tammejarra I). dengan prakarsa Kerajaan Balanipa sebagai kerajaan yang pada periode itu memiliki pengaruh yang sangat besar dari segala aspek. Dari sudut pandang hubungan diplomatik lima kerajaan yang diajak untuk membentuk konfederasi mau tidak mau setuju dengan inisiatif Kerajaan Balanipa. Terlebih lagi pada periode pemerintahan Tomepayung, Kerajaan Balanipa memiliki sistem pemerintahan yang sangat baik terbukti pada tahun 1580-1610 laju perkembangan di Mandar sangat pesat, meliputi segala aspek (leyds, 1940: 26, lotara' pattodioloang, 1991: 41; Naskah Mandar : 109 dan Naskah Awal Sejarah Mandar, 2010 :58).

Pada periode Tomepayung, dibentuk pula angkatan militer yang disebut sebagai "*Appe' Jannangan*" yang terdiri dari ; 1). *Andongguru pakkawusu*, 2). *Andongguru Passinapa*, 3). *Andongguru Pa'burasang dan 4). Andongguru Jowa' Matoa*. Dan dari ke-empat angkatan perang ini dibawah langsung oleh seorang *Mara'dia* yang bergelar *Mara'dia Malolo* (panglima perang. Dalam Bidang ekonomi dan pembangunan kerajaan juga dibentuk sebuah badan yang bertugas untuk mengontrol jalannya roda perekonomian dan pembangunan. Masing-masing dari kedua badan ini diketuai oleh *Sawwanara*

bertugas untuk mengawasi perahu yang keluar masuk dan memungut bea keluar masuk terhadap perahu dan barang dagangan dan *Sakka Manarang* yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan fisik (Anonim, 1984: 90). Struktur ini secara umum dipakai oleh Kerajaan Balanipa namun untuk masalah gelar raja-raja yang termasuk dalam konfederasi memakai gelar *mara'dia*. Gelar *Tomakaka* tidak dipakai lagi.

Ketentuan pemakaian gelar ini menunjukkan legitimasi dari Kerajaan Balanipa karena yang pertama kali menggunakan gelar ini adalah Raja Balanipa. Dan apabila dilihat dari struktur konfederasi ini, Kerajaan Balanipa menjadi Ketua dari Konfederasi. Kerajaan Balanipa sebagai Bapak, Kerajaan Sendana sebagai Ibu dan Kerajaan Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju sebagai anak (Yasil, 1985: 211). Jumlah Kerajaan yang pertama kali ikut dalam perundingan pembentukan konfederasi hanya ada enam namun berikutnya Kerajaan Binuang dimasukkan sebagai anggota ke ketujuh. Pada kasus Kerajaan Binuang, Kerajaan ini merupakan Kerajaan Hadiah dari Kerajaan Gowa. Di mana sebelumnya Binuang merupakan Kerajaan Taklukkan Kerajaan Passokorong dan Kerajaan Batulappa' yang dijual ke Kerajaan Gowa (Syah, 1992: 13-17).

Dengan kata lain, Kerajaan Binuang ikut serta dalam Konfederasi setelah diadakannya Muktamar Tammejarra II (Yasil, 2012: 67). Dengan masuknya Binuang sebagai anggota ke-7 maka Mandar sebagai satu kesatuan administratif telah terbentuk. Menjadi sebuah kekuatan politik yang cukup disegani pada periode ini. Sebuah bentuk negara pada masa klasik. Megaskan bahwa pencapaian lokalitas pada masa klasik merupakan hasil pemikiran masyarakat kita sendiri bukan produk Bangsa Barat. Leonard Andaya juga mempertegas dalam tulisannya yang menyatakan bahwa kekuatan dan kesatuan masyarakat membentuk unit-unit politik dasar di daerah ini (Andaya, 2004: 14). Andaya mengakui bahwa *Pitu Ba'bana*

Binanga adalah sekutu terkuat Kerajaan Gowa.

Kebesaran Konfederasi ini tidak diragukan lagi keberadaannya, bentuk negara yang ditawarkan pada periode klasik ini menggambarkan sebuah tawaran negara federalis. Bahwa perpecahan yang terjadi sebelumnya dapat disatukan melalui konfederasi lantas kenapa negara ini masih berbentuk republik Di mana pemerintahannya terpusat? Dengan pembangunannya yang tidak merata. Menjadi kasus tersendiri dari polemik bentuk negara. Namun Agaknya gagasan bentuk federalis/konfederasi menjadi tawaran yang cukup menarik apabila kita melihat kondisi geografis maupun kultural negara ini. Meski wujud dari negara federalis sebahagian telah terwujud dalam otonomi daerah.

Terlepas dari gagasan tersebut, konfederasi *Pitu Ba'bana Binanga* menjadi *turning point* Mandar sebagai kekuatan besar yang berbentuk Negara Demokrasi. Lahirnya Periode *Amara'diang*, dan digunakannya gelar *mara'dia* sebagai sebuah identitas seorang raja merupakan pencapaian Tomepayung dalam membentuk masyarakat yang berdemokrasi. Ia berhasil membangun sebuah gagasan musyawarah mufakat dalam setiap permasalahan yang terjadi di Mandar. gagasannya ini tertuang dalam nilai-nilai budaya Mandar yang tercatat dalam *Lontara*'' yakni (1) *manu' Tandii pessisi'i* (ayam yang tidak dilihat warnanya) bermakna dalam kehidupan sehari-hari tidak pandang bulu baik status maupun jabatannya, hukum adat tetap dijunjung tinggi. (2) *Beang Tandii Gati* (Beras yang tidak perlu ditakar) bermakna ekonomi berbasis Kerakyatan, tetap mementingkan kepentingan rakyat kecil. (3) *Suwa Tandii Biti* (rambut bersisir tanpa perlu di patut-patut lagi) bermakna Persatuan yang berkesinambungan (4) *Ara-ratang Tandii Dappai* (tali yang tak perlu di ukur) bermakna bahwa hukum/keadilan tidak ada ukuran membeda-bedakan. Konsep inilah yang kemudian dikenal

dengan *Mengga Lenggoq Mengga Belawa* (Yasil, 1985: 208).

Konsep tersebut lahir ketika Tomepayung mengadakan perjanjian dengan *Palilik* (negara vasal) bahwa *palilik* tidak dituntut untuk memperoleh kebesaran bahkan tidak akan dikecilkan (ditelantarkan) oleh Balanipa dengan menjunjung tinggi konsep *mengga Lenggoq Mengga Belawa*. Dan sebagai gantinya Balanipa juga memperoleh perlakuan yang baik ketika orang-orang Balanipa berada di wilayah vasal tersebut (Syah, 1992: 58; Yasil, 1985: 109; Mandra, 2015: 32). Lahirnya konsep ini agaknya menginspirasi pemikiran politik Tomepayung selanjutnya. Dengan kata lain Konsep ini menjadi dasar dari periode Pemerintahan Tomepayung dalam menjalankan pemerintahannya.

Terbukti setiap Tomepayung menyelesaikan masalah di Kerajaan Balanipa bahkan dalam Konfederasi ia selalu menggunakan musyawarah mufakat. Salah satunya ketika Tomepayung mengadakan perundingan untuk menyelesaikan masalah antara Puang di Alu dan Puang di Pussuq (Mandra, 1991: 97). Terlebih lagi ketika Konfederasi *Pitu Ba'bana Binanga* dibentuk, semua lahir dari hasil musyawarah. Ditambah dengan cara Kerajaan Memperlakukan Negara Vasalnya yang tentu saja jiwa Demokrasi tertanam dalam konsep *Mengga Lenggoq Mengga Belawa*.

Konsep *Mengga Lenggoq Mengga Belawa* yang kemudian diterjemahkan oleh masyarakat Mandar terutama pemimpin-pemimpin Mandar selanjutnya. Maka dengan konsep inilah pemerintahan di Mandar dijalankan oleh Kerajaan Balanipa maupun kerajaan yang termasuk dalam Konfederasi *Pitu Ba'bana Binanga*. Kerajaan yang berasaskan pada pencapaian kesejahteraan dan keadilan kepada setiap warga kerajaan, Tidak memandang bulu dalam perlakuan hukum dan yang terpenting adalah selalu mengedepankan musyawarah dalam mencapai mufakat. Konsep inilah yang dipegang teguh oleh Kerajaan Balanipa bahkan seluruh Kerajaan

yang menjadi Anggota Persekutuan *Pitu Ba'bana Binanga*. Entah terjadi perubahan setelah Belanda melakukan ekspansi ke Mandar dalam rangka menaklukkan Sulawesi secara keseluruhan setelah Kerajaan Gowa jatuh ke tangan Belanda. Kajian tersebut menjadi studi tersendiri kedepannya.

PENUTUP

Perubahan sistem kepemimpinan di Mandar yakni dari *Tomakaka* menjadi *Mara'dia* berpengaruh pada sistem pemerintahan yang pada akhirnya membentuk sistem pemerintahan baru. Dengan kata lain perubahan kepemimpinan mengubah sistem yang ada. Tokoh perubahan tersebut yakni I Manyambungi. Ia merupakan keturunan Orang Mandar yang belajar ke Kerajaan Gowa pada rentan periode tersebut. Tokoh inilah yang Mengalahkan Kerajaan Passokkorang dan Mengganti sistem kepemimpinan *Tomakaka* menjadi *Mara'dia* sekaligus mengganti sistem pemerintahannya. Di mana sebelumnya posisi raja adalah mutlak (otoriter) dan saat diubah, posisi raja tidak lagi mutlak (demokratis). Jabatan seorang raja bisa diduduki oleh siapa saja tanpa pandang bulu selama ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Bahkan seorang raja bisa diturunkan apabila ia sudah tidak memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin yang baik.

Pada perkembangan selanjutnya, Raja Ke-2 Tomepayung Menjabat. Sebagai *Mara'dia* ke-2 setelah ayahnya, Tomepayung Membawa dampak yang sangat signifikan terhadap Kerajaan Balanipa Bahkan Mandar pada periode Abad XVI. Apabila I Manyambungi merubah sistem kepemimpinan dan sistem pemerintahan, maka Tomepayung menyempurnakan perubahan tersebut. Dengan membentuk lembaga-lembaga dalam struktur pemerintahan. Diantara lembaga-lembaga tersebut adalah *App'e' Banua Kaiyyang* jugalah yang melantik semua perangkat pemerintahan mulai dari *Mara'dia Matoa* (perdana menteri),

Mara'dia Malolo (panglima perang), dua orang *Pa'bicara* (penasehat) dan 8 *Pappuangan*. Adapun dua orang *pa'bicara* dan 8 *papuangan* dikenal sebagai "*Ada Sappulo Sokko*". Selain itu, beberapa lembaga tersebut memiliki divisi-divisi tersendiri. Sebuah gambaran sistem pemerintahan yang sudah sangat restruktur pada abad XVI.

Sebuah Bentuk Negara merupakan gagasan dari sistem ini. Konfederasi Tujuh Kerajaan di Mandar (*Pitu Ba'bana Biananga*) merupakan satu pencapaian terbesar yang dilakukan oleh Tomepayung karena konfederasi inilah yang menjadi simbol lahirnya sebuah Kerajaan-kerajaan besar dan berpengaruh di Sulawesi pada periode Abad VII. Sebuah simbol yang melambangkan persatuan dan kesatuan Di mana musyawarah dan penyeteraan dijunjung tinggi diantara tujuh kerajaan ini. Tidak ada pembeda dalam menjalankan pemerintahan. Apabila seseorang bersalah maka ia akan dihukum sesuai dengan aturan. Kebenaran sangat dijunjung tinggi.

Mengga Lenggoq Mengga Belawa merupakan salah satu konsep yang ditawarkan oleh sistem ini. Bahwa jiwa Demokrasi tertanam dalam konsep tersebut. (1) *manu' Tandi pessisi'i* (ayam yang tidak dilihat sisiknya) bermakna dalam kehidupan sehari-hari tidak pandang bulu baik status maupun jabatannya, hukum adat tetap dijunjung tinggi. (2) *Beang Tandi Gati* (Beras yang tidak perlu ditakar) bermakna ekonomi berbasis Kerakyatan, tetap mementingkan kepentingan rakyat kecil. (3) *Suwa Tandi Biti* (rambut bersisir tanpa perlu di patut-patut lagi) bermakna Persatuan yang berkesinambungan (4) *Ara-ratang Tandi Dappai* (tali yang tak perlu di ukur) bermakna bahwa hukum/keadilan tidak ada ukuran membeda-bedakan.

Aplikasi konsep tersebut dijalankan oleh masyarakat Mandar dengan menjunjung tinggi kebenaran, setiap orang bisa mengajukan sebuah kebenaran. Raja tidak mempunyai legitimasi dan bersikap represif terhadap rakyat. suara dan kondisi rakyat adalah penentu dari langgengnya

kekuasaan sang raja. apabila rakyat mengalami sengketa maka yang dilakukan adalah dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Lontara'

Anonim, Laoran Hasil Seminar Kebudayaan Mandar I Tanggal 31 Juli S/D 2 Agustus 1984 di Majene.

Arsip Nasional, bb.28 1756. Acte Van Renovatie den Vorstan Van Mandhar, *Contract mit Mandhar Balanipa* 30 Mei 1850.

C Noote Boom. 1994/1995. *Laporan Penelitian dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan Kerajaan Balanipa - Mandar*. Ujung Pandang : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Ujung Pandang.

Hanoch, Luhukay dkk. 2006. *Memori Asisten Residen W.J.Leyds Selama Bertugas di Mandar*. Yayasan Kaitupa.

Mandra. A.M. 2015. *Transliterasi dan Terjemahan Lontara Balanipa Mandar*. Makassar: Kretakupa.

Mandra, A. & dkk, 1991. *Lontar Mandar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Muthalib Abdul dkk. 1988. *Transelisasi dan Terjemahan O Diadaq O Dibiasa (Naskah Lontarak Mandar)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Sulawesi Selatan 1988.

Syah, Tanawali Aziz. 1992. *Lontarak 1 Pattodioloang di Mandar*. Ujung Pandang: Taruna Remaja.

Syah, Tanawali Aziz. 1992. *Lontarak 2 Pattodioloang di Mandar*. Ujung Pandang: Taruna Remaja.

Yasil, Suardi dkk. 2012. *Naskah Awal Sejarah Polewali Mandar*. Polewali

Mandar: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar.

Yasil, S. et al., 1985. *Inventarisasi, Transkripsi, Penerjemahan dan Penulisan Latar Belakang Isi Naskah Kuno/Lontara Mandar Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Buku-buku

Abidin Andi Zainal. 1999. *Sejarah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press.

Abbas Ibarahim. 1999. *Pendekatan Budaya Mandar*. Makassar: UD Hijrah Grafika.

Ahmad dkk. 2007. *Sejarah Mandar dan Sejarah Perjuangan Bangsa Di Kab.Majene*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Majene Binmudorabud Seksi Kebudayaan.

Andaya, L. Y., 2004. *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad 17*. Makassar: INNINAWA.

Asdy Ahmad dkk. 2003. *Mandar Dalam Kenangan tentang Latar Belakang Keberadaan Arajang Balanipa*. Yayasan Mahaputra Mandar.

Asdy Ahmad dan Anwar Sewang. 2010. *Etika Dalam Kehidupan Orang Mandar*. Yayasan Mahaputra Mandar.

Ball, T., Dagger, R. & O'neil, D., 2013. *Political Ideologies and Democratic Ideal*. New York: Pearson.

Barthes Roland, *Mythologies*, 1983. New York : Hill and Wang, diterjemahkan oleh Nurhadi. A. Sihabul Millah. *Mitologi*. 2015. Bantul:Kreasi Wacana

Diane Revitch, A. T., 2005. *Demokrasi Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan Obor.

Giddens Athony. *The Constitution of Society: Outline of The Theory of Strukturation*.1984. USA: University of California Press. Diterjemahkan

- oleh Maufur dan Darmayanto. 2010. *Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hook Sidney. *The Hero in History*, 1969. Boston: Beacon Pers.
- Idham dkk. 2010. *Sejarah Perjuangan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat*. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat.
- Kartodirdjo, S., 2014. *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Madjid, M. Saleh dan Abd. Rahman Hamid. 2007. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Makassar: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- Mandra A M. 1990. *Mandar dan Bone dalam Lontar Mandar*.
- Mandra A M. 2002. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Bangsa di Mandar*. Majene: Pemerintah Daerah Kab.Majene.
- Mappangara Suardi. 2004. *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mattulada, 1986. Demokrasi dalam Tradisi Masyarakat Indonesia. Dalam: *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES, pp. 3-15.
- Mattulada. 1998. *Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang : Universitas Hasanuddin Press.
- Munoz Paul Michel. *Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia*. Yogyakarta : Mitra Abadi.
- Palenggomang Edwar L. 2012. *Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat*. Makassar: De La Macca.
- Sahuding. 2004. *Pitu Ulunna Salu dalam Imperium Sejarah*. Makassar: Selatan Jaya.
- Sinrang Syaiful. 1994. *Mengenal Mandar Sekilas Lintas "Perjuangan Rakyat Mandar Melawan Belanda (1667-1949)* .Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan Mandar Rewata Rio.
- Sinrang Syaiful. 1994. *Mengenal Mandar Sekilas Lintas*. Group "Tipalayo" Polemaju Mandar.
- Priyadi Sugeng. 2015. *Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Syah, Tanawali Aziz. 1980/1981. *I Calo Ammana I Wewang Topole di Balitung Pahlawan Daerah Mandar Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Pemda T.K. I. Prop. Sulsel.
- Syah, Tanawali Aziz. 1997. *Sejarah Mandar Polmas-Majene-Mamuju jilid I*, yayasan"Al-Azis". Ujung Pandang : yayasan "Al-Aziz" Ujung Pandang.
- Syah, Tanawali Aziz. 1998. *Sejarah Mandar Polmas-Majene-Mamuju jilid II*, yayasan"Al-Azis". Ujung Pandang : yayasan "Al-Aziz" Ujung Pandang.
- Syah, Tanawali Aziz. 1998. *Sejarah Mandar Polmas-Majene-Mamuju jilid III*, yayasan"Al-Azis". Ujung Pandang: yayasan "Al-Aziz" Ujung Pandang.

Jurnal

- Benda, H. J., 1964. Democracy in Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, pp. 449-456.
- Feith, H., 1965. History, Theory, and Indonesian Politics: A Reply to Harry J. Benda. *The Journal of Asian Studies*, pp. 305-312.